



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPEG
KECAMATAN DONRI-DONRI



**RENSTRA
KECAMATAN DONRI-DONRI**

(RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DONRI-DONRI)

2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Donri-Donri pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, yang disusun sebagai masukan dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021

Rancangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Donri-Donri ini akan menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi.



Drs. H. FATEKHUDDIN, M. Si
NIP. 19650519 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya	13
2.3 Kinerja Pelayanan	19
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan SKPD	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD	27
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah	28
3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra SKPD	33
3.4 Telaahan RTW dan KLHS	36
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
4.1 Visi dan Misi	41
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	43
4.3 Strategi dan Kebijakan	47
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	49
5.2 Indikator Kinerja	51
5.3 Kelompok Sasaran	52
5.4 Pendanaan Indikatif	52
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	56
BAB VI PENUTUP	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan, yang disusun sebagai pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021, yang berfungsi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut :

- Tahap Pertama :
Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
- Tahap Kedua :
Menyusun Rancangan Renstra SKPD – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati bersama.

Langkah-langkah penyusunan Renstra, diuraikan sebagai berikut :

1. Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;

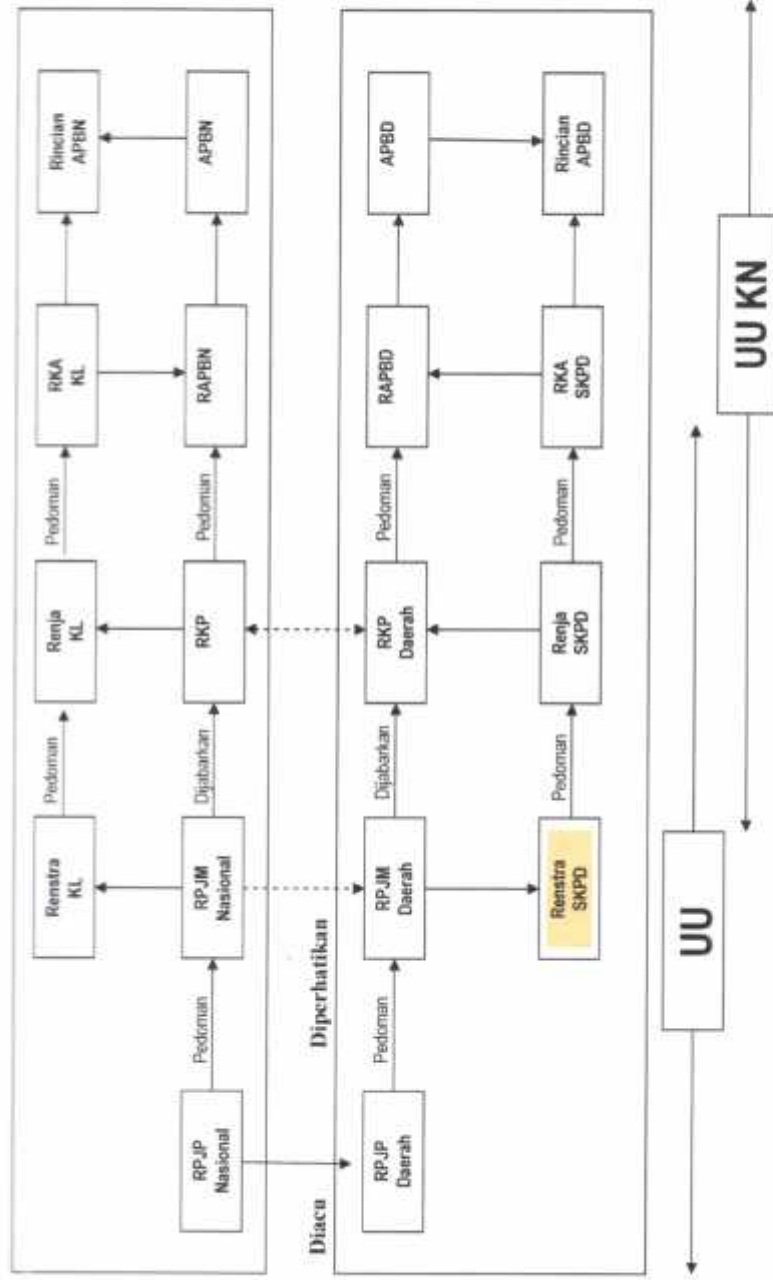


2. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih;
3. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD periode sebelumnya;
4. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan SKPD, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
6. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;
7. Hal tersebut di atas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam Forum Renstra SKPD, kemudian disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Soppeng, sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrebang RPJMD. Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra SKPD Kecamatan Donri-Donri.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota serta dengan Renja SKPD dapat dilihat pada bagan Berikut:



KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA – SKPD





1.2. Landasan Hukum

Renstra Kantor Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 disusun dengan landasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
- g. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
- n. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat Di Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Donri-Donri dan untuk menyatukan persepsi dan gerak langkah dalam mewujudkan budaya sosial kemasyarakatan yang demokratis, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, pemerataan akses pemerintahan serta peningkatan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan asas keterbukaan.

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Donri-Donri, secara spesifik adalah :

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas aparat Kantor Kecamatan Donri-Donri;
2. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melaksanakan kontrol atas kinerja organisasi;
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (out comes);
4. Menjadi media komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya di Kantor Kecamatan Donri-Donri.



1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan pemahaman yang menyeluruh, maka Renstra SKPD 2016-2021 Kantor Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng disusun secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Kecamatan Donri-Donri, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian dalam pelaksanaan Renstra dan RPJMD periode sebelumnya serta hambatan yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi Identifikasi pemahaman berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok kerja serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Kantor Kecamatan Donri-Donri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng

BAB VII PENUTUP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kedudukan Kantor Kecamatan Donri-Donri dalam Pemerintahan Kabupaten Soppeng adalah unsur penunjang utama Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

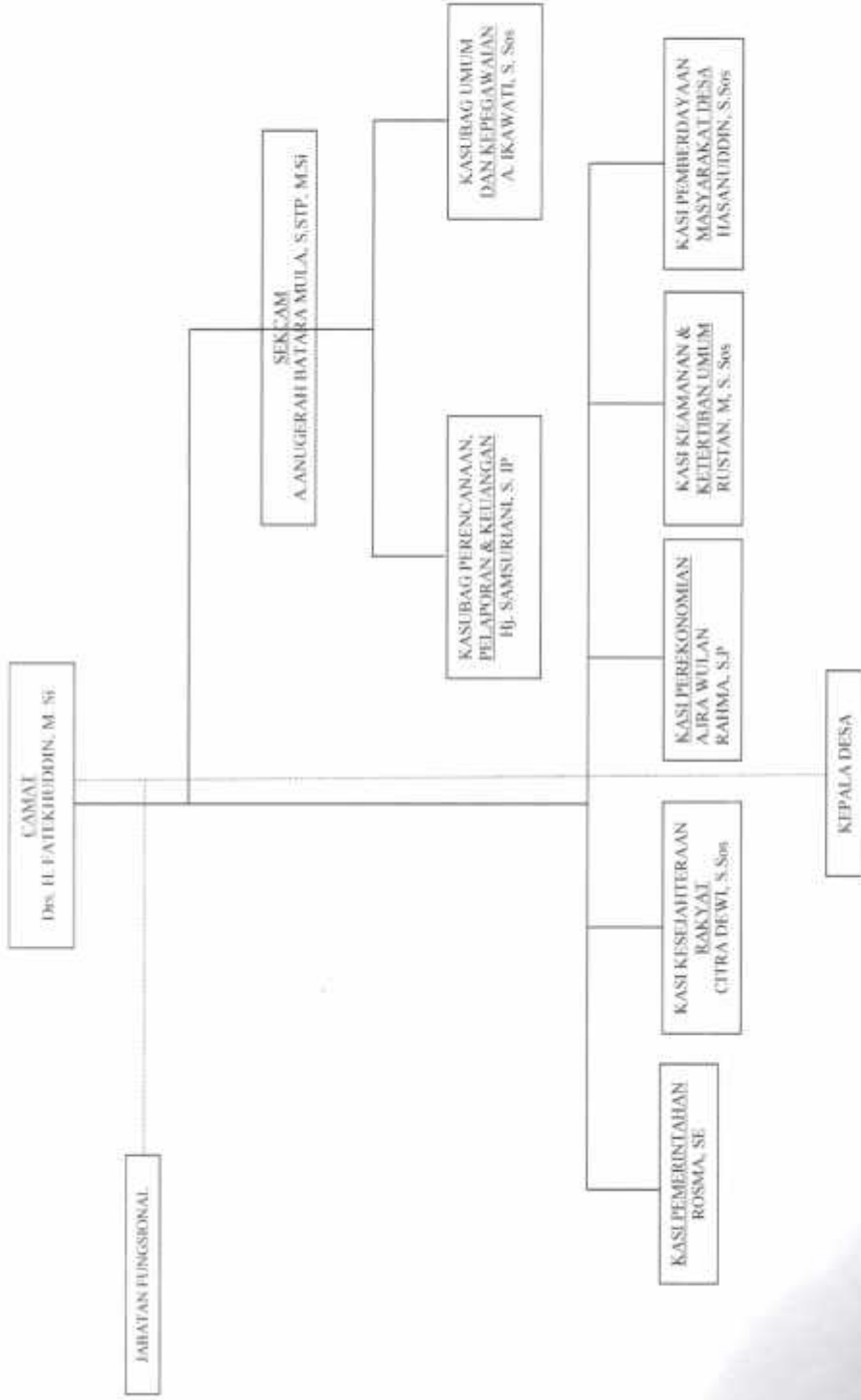
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Donri-Donri mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Kantor Kecamatan Donri-Donri, sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Kasi Pemerintahan;
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Kasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kasi Keamanan dan Ketertiban;
- g. Kasi Perekonomian;



PERDA NO.05 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT DONRI-DONRI





Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 37/PER-BUP/IX/2008, tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- d. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa.
- i. Pelaksanaan dan pembinaan Kesekretariatan Kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



Adapun rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset) dan keuangan Kecamatan.
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai serta pelaksanaan waskat dalam lingkup Kecamatan.
- i. Meyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerjs terkait.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- k. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

1. Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan, meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
2. Pengkoordinasian tugas pekerjaan di lingkungan Kecamatan.
3. Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan.
4. Penyusunan dan pengelolaan anggaran Kecamatan di luar gaji pegawai.
5. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum.



6. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
7. Penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi, keprotokolan serta ketatausahaan tingkat Kecamatan.
8. Penyelenggaraan keamanan rumah tangga umum Kecamatan.
9. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Camat juga dibantu oleh Kepala Seksi dan Kasubag beserta seluruh staf.

Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebanyak 27 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	16
3	Golongan II	9
4	Golongan I	0

Personil tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme, proses dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Donri-Donri memegang teguh beberapa prinsip, antara lain :

✓ Sederhana

Prosedur dan tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah untuk masyarakat yang meminta pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis dan prosedur panjang ataupun berbelit-belit.



- ✓ Jelas dan Pasti
Prosedur dan tatacara penyelenggaraan pelayanan serta informasi mengenai sarana penunjangnya digambarkan secara jelas dan pasti.
- ✓ Aman
Proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- ✓ Terbuka
Penginformasian instrumen pelayanan dilaksanakan secara terbuka
- ✓ Efisien
Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan publik yang diberikan.
- ✓ Ekonomis
Tidak dikenakan biaya, atau pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.
- ✓ Adil dan Merata
Cakupan/jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- ✓ Tepat Waktu
pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.



2.2. Sumber Daya

Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Donri-Donri, dapat digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan serta diklat Struktural yaitu

Tabel 2 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	3
2	Sarjana (Strata 1)	22
3	Diploma (D III)	0
4	SMA	2

Tabel 3 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Latihan
(Diklat) Struktural

No	Diklat Struktural	Jumlah (orang)
1	SPAMA (DiklatPim III)	1
2	ADUM (DiklatPim IV)	7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Donri-Donri, maka dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4 : Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
1	Meja Kerja	35	-	35
2	Mesin Ketik	2	3	5
3	Kendaraan Roda Dua	2	-	2
4	Komputer	5	1	6
5	Kursi kerja	19	-	19
6	Lemari	9	-	9



7	Kendaraan Roda Empat	2	-	2
8	Rak besi	-	1	1
9	Laptop	5	1	6
10	Telepon	1	-	1
11	Meja Rapat	20	-	20
12	Filing Cabinet	3	-	3
13	AC	4	-	4
14	Kulkas	3	-	3
15	Kipas Angin	12	-	12
16	Kompor Gas	2	1	3
17	Televisi	3	2	5
18	Dispenser	1	-	1
19	Printer	5	4	9
20	Scanner	1	-	1
21	Kamera	1	-	1
22	Proyektor	1	-	1
23	Sound system	1	-	1

Gambaran umum Kecamatan Donri-Donri yang mencerminkan potensi yang dimiliki, dapat digambarkan sebagai berikut :

Luas wilayah kecamatan Donri-Donri kabupaten Soppeng adalah 222 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Marioriwawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Lalabata

Sebelah timur : Kecamatan Ganra dan Kabupaten Wajo

Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Pemerintahan Kecamatan Donri-Donri membawahi 9 Desa yaitu : Pesse, Pising, Sering, Donri-Donri, Labokong, Lalabata Riaja, Tottong, Leworeng dan Kessing.



2.2.1. Topografi

Kecamatan Donri-Donri berada diantara $4^{\circ} 06' 0''$ - $4^{\circ} 32' 0''$ LS dan $119^{\circ} 42' 18''$ - $120^{\circ} 06' 13''$ BT. Keadaan topografinya beragam, sebagian desa berada pada wilayah yang datar dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit. Secara keseluruhan, wilayah Kecamatan Donri-Donri berada pada ketinggian antara 0 sampai 161 Meter di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar 17° - 25° Celsius, serta curah hujan tahunan berkisar antara 1094 mm dan kecepatan angin lemah sampai sedang.

2.2.2. Hidrologi

Kecamatan Donri-Donri dilalui oleh beberapa sungai sebagai sumber air, yang dimanfaatkan sebagai pengairan

2.2.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Donri-Donri pada akhir tahun 2015, tercatat sebanyak 23.956 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11.267 jiwa dan perempuan sebanyak 12.689 jiwa, dan tersebar di 9 Desa, yaitu :

- Desa Pesse	: 2.801 jiwa
- Desa Pising	: 2.635 jiwa
- Desa Donri-Donri	: 2.474 jiwa
- Desa Sering	: 1.662 jiwa
- Desa Labokong	: 3.349 jiwa
- Desa Lalabata Riaja	: 3.368 jiwa
- Desa Tottong	: 2.604 jiwa
- Desa Leworeng	: 2.766 jiwa
- Desa Kessing	: 1.297 jiwa



2.2.4. Pola Penggunaan lahan

Tabel 5 : Luas Potensi Lahan

No	Potensi Lahan	Luas	Ket
1	Luas Tanah sawah	8.546	Ha
2	Luas tanah perkebunan	2.145	Ha
3	Luas tanah ladang	1.978	Ha
4	Luas tanah hutan	9.155	Ha
5	Luas danau/rawa	200	Ha

2.2.5. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Program sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang akan tetap mendapatkan perhatian pemerintah daerah, secara khusus dalam wilayah kecamatan Donri-Donri sebagian besar penduduk adalah bertani. Kecamatan Donri-Donri merupakan wilayah di Kabupaten Soppeng dengan potensi pertanian padi yang cukup besar. Pada tahun 2014, menghasilkan produksi padi sebanyak 45.882 Ton, yang dihasilkan dari areal tanam seluas 8.546 Hektar.

Desa Kessing dan Desa Leworeng merupakan desa utama penghasil padi dengan produksi masing-masing sebanyak 12.531 dan 7.985 Ton. Hasil perkebunan yang cukup menonjol adalah kakao.

Adapun rincian ternak tahun 2014, terdapat ternak sapi sebanyak 5.438 ekor, ternak ayam buras sebanyak 56.672 ekor, ayam ras petelur sebanyak 39.000 ekor dan itik sebanyak 14.008 ekor

2.2.6. Pariwisata

Adapun potensi pariwisata kecamatan Donri-Donri adalah makam Petta Ulu Sappe dan Petta KaramaE di sering, Sungai Luppereng Kajaoe dan mata air AppejjengE di Lalabata Riaja dan Cagar budaya manurungE sekkanyili di Totong.



2.2.7. Industri dan Perdagangan

Bidang ekonomi lain yang diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah untuk menciptakan kesempatan kerja dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada adalah sektor industri dan perdagangan. Adapun potensi industri yang ada di Kecamatan Donri-Donri sebanyak 263 buah yang terdiri dari industri kecil 7 buah dan industri rumah tangga (Home Industri) sebanyak 256 buah. Sedangkan Potensi usaha Perdagangan sebanyak 613 buah serta Potensi Angkutan sebanyak 194 buah.

2.2.8. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan soko guru perekonomian daerah yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus kedepan. Adapun Jumlah Koperasi dan UKM secara keseluruhan sebanyak 20 unit yang terdiri dari : KUD sebanyak 2 Unit dan non KUD sebanyak 18 Unit.

2.2.9. Ketenaga Kerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri dalam suasana kehidupan serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan, untuk itu telah dilakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberian modal.

Dari jumlah penduduk Kecamatan Donri-Donri tahun 2015 sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani sedangkan sebagian lagi memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan, peternak, buruh (Industri, bangunan, pertambangan), pedagang, pengangkutan serta Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri.



2.2.10. Pendidikan.

Dalam mewujudkan Kecamatan Donri-Donri sebagai tempat pendidikan yang bermutu tinggi dan menjadi standar mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun tingkatan pendidikan yang telah ada selama ini adalah Sekolah Taman Kanak-Kanak 10 buah ditambah dengan PAUD sebanyak 9 Buah, Sekolah dasar (SD) 28 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 6 buah dan Sekolah Menengah Umum (SMU) 1 buah.

2.2.12. Kesehatan.

Dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang optimal perlu didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Sampai tahun 2015 ini, sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Donri-Donri terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 6 unit, Poskesdes 8 unit. Serta Posyandu sebanyak 40 buah. Sedangkan untuk tenaga Medis berjumlah 57 orang yang terdiri dari dokter umum sebanyak 2 orang, dokter gigi sebanyak 1 orang, perawat sebanyak 19 orang, bidan sebanyak 11 orang serta juga dibantu oleh dukun bayi sebanyak 25 orang. Tenaga tersebut diatas dianggap masih kurang untuk melayani masyarakat diKecamatan Donri-Donri khususnya dibidang pelayanan kesehatan.

2.2.13. Keluarga Berencana.

Informasi keluarga Berencana memberikan penjelasan kepada pasangan suami istri terutama pada pasangan usia subur (PUS) sehingga dapat mengatur jumlah anak yang ideal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga.

Di Kecamatan Donri-Donri pada tahun 2014 penggunaan alat / cara KB modern yang digunakan adalah suntikan = 1.249 orang, pil = 1.117



orang, kondom = 116 orang, IUD = 244 orang, implan = 147 orang, MOW = 78 orang dengan klinik KB 2 unit, pos KB desa 2 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Donri-Donri yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Soppeng;
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Donri-Donri dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Donri-Donri berdasarkan pada sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1



Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Donri-Donri sampai dengan akhir periode diatas, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, hanya 4 (empat) diantaranya telah mencapai target dan 3 (tiga) indikator lainnya tidak mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pelayanan. Adapun penjelasan tiap indikator kinerja, adalah sebagai berikut :

A. Indikator kinerja yang mencapai target

1. Persentase surat keterangan SITU, IMB dan lain-lain yang diterbitkan tepat waktu.

Keseluruhan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu karena aparat yang bertugas senantiasa berada di tempat, serta selalu siap melayani kebutuhan masyarakat dengan berdasar pada SOP.

2. Persentase pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Tingginya keinginan aparat untuk meningkatkan potensi SDM, sehingga seluruh bimtek atau diklat diikuti sesuai arahan pimpinan berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia.

3. Persentase jumlah penanganan kasus.

Seluruh kasus-kasus sengketa tanah dari desa ditangani dengan mencari solusi damai secara kekeluargaan, atau diarahkan ke pengadilan untuk proses hukum, karena Pemerintah Kecamatan tidak memiliki fungsi eksekusi.

4. Persentase pembinaan PKK desa.

Pembinaan dilakukan terhadap seluruh Tim PKK desa yang ada di Kecamatan Donri-Donri, yakni 9 (sembilan) Tim PKK desa.

B. Indikator kinerja yang tidak mencapai target

1. Jumlah pengunjung taman bacaan kecamatan.

Sebagian yang berkunjung tidak mengisi daftar pengunjung, menyebabkan rasio capaian pada akhir periode renstra 97,14%. Hanya 68 orang yang mengisi daftar dari 70 target yang ditetapkan, meskipun realitanya pengunjung taman bacaan kecamatan lebih dari target.

2. Persentase capaian target PBB.

Pada tahun ke 5 persentase capaian 94,36% akibat keterlambatan sebagian wajib pajak untuk segera melunasi Pajak Bumi dan Bangunan, meskipun



sebelumnya pada tahun ke 2 dan ke 4 rasio over target. Frekuensi sosialisasi yang lebih meningkat diharapkan menjadi solusi diwaktu mendatang.

3. Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan kamtibmas.

Karena keterbatasan waktu dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting penyuluhan keamanan sehingga tidak seluruh masyarakat yang diundang menyempatkan diri untuk hadir. Meskipun demikian persentase kehadiran peserta dari tahun ketahun terus meningkat, rasio capaian pada tahun ke 5 mencapai 99,17%.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Donri-Donri untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2

Tabel 2.1
 ALOKASI DAN RELASI PELAYANAN PERTANJANG KECAMATAN COWI DOWE
 KABUPATEN SOTTENO

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rasio rata Perhitungan Realisasi	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran (11)	Realisasi (12)
Anggaran administrasi (perencanaan)	100.793.111,00	107.811.700,00	202.778.153,00	244.487.250,00	138.530.480,00	158.505.821,00	198.112.129,00	239.074.203,00	137,11%	147,07%	98,47%	93,20%	117,11%	95,30%
Pengelolaan sarana & prasarana pertanian	250.000.000,00	130.383.282,00	138.713.110,00	127.992.510,00	179.829.460,00	100.881.000,00	138.710.050,00	106.504.447,00	70,99%	80,98%	100,00%	100,00%	2.550.858,00	6.322.777,00
Pengelolaan fasilitas pertanian	11.000.000,00	12.280.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.000.000,00	11.000.000,00
Pengelolaan fasilitas pertanian lainnya	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.211.800,00	8.500.000,00	0,00	4.460.000,00	25,00%	0,00%	85,00%	0,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
Pengelolaan transportasi umum	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.998.900,00	11.997.100,00	12.000.000,00	99,99%	99,98%	100,00%	100,00%	12.000.000,00	11.997.100,00
Pengelolaan transportasi umum lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Pengelolaan dan fasilitas pertanian dan ACU Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00



Dilihat dari tabel diatas, berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Donri-Donri bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Ada beberapa beberapa program yang rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasinya minus, hal ini disebabkan karena program tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun. Program peningkatan disiplin aparatur hanya dianggarkan pada tahun ke 1, ke 2 dan ke 3 (2011 dan 2013), begitu pula program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang juga tidak dianggarkan pada tahun ke 3 (2013). Sedangkan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana ADD baru dianggarkan pada 2 (dua) tahun terakhir (2014-2015).

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kantor Kecamatan Donri-Donri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Donri-Donri harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
4. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Donri-Donri dengan memanfaatkan potensi dan peluang.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Donri-Donri dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis, dapat meningkatkan peran Kecamatan Donri-Donri dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Donri-Donri untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.



3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Donri-Donri
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan bagi setiap pegawai.
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diharapkan memberi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Donri-Donri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat, antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.



- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya, pemerintah tak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka dari itulah, Bupati dan wakil Bupati Soppeng bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani rakyat Soppeng, sehingga bermuara pada terciptanya Kabupaten Soppeng yang lebih baik.

a) Visi

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik", dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani**; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola



pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik;** bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidayaan ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan



belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan



layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi.



Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Donri-Donri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Donri-Donri antara lain;

1. Pencapaian **Misi ke-5**: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan.



Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yaitu :

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi</p> <p>a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.</p>	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan desa.
2	<p>Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan</p> <p>Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan</p>	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.	Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.	Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD



kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Donri-Donri yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra SKPD Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis SKPD Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Donri-Donri yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.



2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, antara lain adalah :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk semua lini belum responsif gender.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut berperanserta aktif.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra SKPD Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Donri-Donri telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra SKPD provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Donri-Donri sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.



Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan yang terintegrasi dengan IMB, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin dari instansi pelaksana, penerbitan surat keterangan ini juga merupakan menjadi bahagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Arahan lokasi untuk pengembangan pemukiman adalah Donri-Donri sebagai ibukota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp) dan pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu pusat permukiman perdesaan Pising dan pusat permukiman perdesaan Lalabata Riaja serta permukiman perdesaan



lainnya sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite, komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami di area sekitar sungai/anak sungai DaoE, sungai/anak sungai Paddangeng, sungai/anak sungai Leworeng sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;



- a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
- b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
- c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Donri-Donri.

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan Donri-Donri merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Donri-Donri dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Kecamatan Donri-Donri.

Adapun isu strategis Kecamatan Donri-Donri dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa yang disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi.
2. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pertanggung jawaban kinerja;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kantor Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng harus dibawa agar tetap Eksis, Kreatif, Antisipatif, Inovatif serta Produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi jangka menengah, yaitu **"Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik"**, dimana terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik", maka Visi Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng adalah ***"Pelayanan Profesional Untuk Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Yang Lebih Baik Tahun 2021"***. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pelayanan profesional : Sebagai pelayan masyarakat, aparat Kantor Kecamatan Donri-Donri diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan jujur, adil dan terbuka bagi semua kalangan, memaksimalkan kemampuan diri dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk kepuasan masyarakat yang dilayani.
- Kecamatan Donri-Donri yang lebih baik : Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu menjadikan Kecamatan Donri-Donri lebih baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat.



4.1.2. Misi

Aparat Pemerintah dalam mengemban tugasnya sehari-hari harus mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang dipikulnya, untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan tersebut, Seorang aparat Pemerintah selaku Pelayan Masyarakat diharuskan memiliki Profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, Profesionalisme ini dapat terwujud apabila mampu mengoptimalkan kemampuan pribadi maupun pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimilikinya.

Seiring dengan Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dalam rangka mendukung Visi tersebut Misi yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kecamatan dan desa dengan dukungan SDM yang profesional (M1).
2. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan (M2).

Keterkaitan Pokok Visi dan Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan profesional	1. Mengoptimalkan peran kematan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM ASN yang profesional (M1)
2	Kecamatan Donri-Donri yang lebih baik	2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan (M2)



4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1 Tujuan

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Donri-Donri menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut :

M1T1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;

M2T2 : Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan tersebut di atas terkait dengan beberapa tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, antara lain :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan (M5T9)
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. (M7T11).

Keterkaitan Tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng Dengan Tujuan Renstra
Kecamatan Donri-Donri 2016-2021

Tujuan RPJMD (1)	Tujuan Renstra (2)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan (M5T9)	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (M1T1)
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (M7T11)	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (M2T2)



Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Keterkaitan Misi Dengan Tujuan

No. (1)	MISI (2)	TUJUAN (3)	INDIKATOR TUJUAN (4)	TARGET AKHIR (5)
1.	Mengoptimalkan pelayanan kecamatan dan desa dengan dukungan SDM yang profesional (M1)	- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (T1)	- Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	95%
		- Meningkatnya kinerja Aparatur (T2)	- Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	100%
2.	Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan (M2)	- Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (T3)	- Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan yang difasilitasi	95%

4.2.2 Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Donri-Donri 2016-2021, sebagai berikut;

T1S1 : Meningkatnya pelayanan perizinan;

T2S2 : Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;

T2S3 : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan.



Sasaran tersebut di atas sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, yaitu :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa. (M5T9S20)
- Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan umat. (M7T11S23)

Keterkaitan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Dengan Sasaran Renstra Kecamatan Donri-Donri 2016-2021

Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra
(1)	(2)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (M5T9S20)	Meningkatnya pelayanan perizinan (M1T1S1)
	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator (M1T1S2)
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan (M1T1S3)
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (M1T1S4)
Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan umat (M7T11S23)	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (M2T2S3)

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan (T1)	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.	Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	60%	87%	90%	93%	95%	100%
2	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan (T2)	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator (S2)	Persentase rekomendasi dibidang pemerintahan, pembangunan serta keamanan dan ketertiban yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kinerja Aparatur (T3)	Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (S3)	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	70%	70%	70%	70%	70%	70%
			Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan (S4)	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor (S5)	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Donri-Donri 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Donri-Donri menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
2. Memperkuat manajemen internal dalam hal kompetensi ASN, menyediakan sarana dan prasarana perkantoran serta mendorong prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi.
4. Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan kecamatan dan desa.
2. Meningkatkan kualitas SDM ASN, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran secara berkualitas sesuai kebutuhan pelaporan keuangan dan kinerja.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
4. Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat.



Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut;

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan (T1)	Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)	- Memperkuat pelayanan kecamatan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.	- Mengoptimalkan pelayanan di kecamatan dan desa;
			- Memperkuat manajemen internal dalam hal kompetensi ASN, menyediakan sarana dan prasarana perkantoran serta mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.	- Meningkatkan kualitas SDM ASN, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran secara berkualitas sesuai kebutuhan pelaporan keuangan dan kinerja.
2	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan (T2)	- Meningkatkan peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator (S2)	- Memperkuat koordinasi dan fasilitasi.	- Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
		- Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (S3)	- Mengatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	- Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat;
3	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan (S4)	- Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian	- Peningkatan pelayanan kepegawaian
			- Melaksanakan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai	- Pelaksanaan pelatihan
			- Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan dan pelaporan kinerja	- Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	- Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	- Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan
			- Meningkatkan kualitas sarana prasarana bagi pegawai	- Pemeliharaan sarana perkantoran
				- Inventarisasi sarana prasarana



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Donri-Donri selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Donri-Donri. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Donri-Donri akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Soppeng selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- e. Pengadaan Meubeleur



- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- h. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 4. Program Pelayanan Perkantoran
Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
 - h. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
- 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
 - a. Bupati Menyapa
 - b. Penyuluhan Kamtibmas
- 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan
Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:
 - a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD Desa



5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Donri-Donri berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Donri-Donri disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator kinerja;

Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja;

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Indikator kinerja;

Persentase Pegawai Negeri Sipil berkinerja baik.

4. Program Pelayanan Perkantoran

Indikator kinerja;

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja;

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu



6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Indikator kinerja;
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/Kelurahan
Indikator kinerja;
Persentase Kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Donri-Donri adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPTD serta masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Donri-Donri. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Donri-Donri, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur perencanaan dan pembangunan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

5.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Donri-Donri bersumber pada dana APBD Kabupaten Soppeng. Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Donri-Donri. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program.



Kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 7 (tujuh) Program untuk periode Renstra Tahun 2016-2021 pada Kecamatan Donri-Donri sebesar Rp. 3.113.557.117,- dengan perincian :

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 160.700.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.040.008.317,-
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 134.750.000,-
4. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 1.373.978.800,-
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 60.000.000,-
6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 172.000.000,-
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan Rp. 172.120.000,-

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1

[illegible]

[illegible]



Lanjutan tabel 5.1



BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Donri-Donri bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Donri-Donri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian *Misi ke-5*: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/Kelurahan (T9)

Sasaran:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

2. *Misi 7*: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (T11)

Sasaran:

- a. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23)

Selanjutnya Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Donri-Donri Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan kecamatan dan desa/keurahan (%)	60%	95%	95%	97%	97%	100%	100%
2	Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	90%	95%	97%	98%	99%	100%	100%



Indikator Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Donri-Donri

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Tujuan								
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	60%	60%	87%	90%	93%	95%	100%	100%
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	70%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%
3	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran								
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	60%	60%	87%	90%	93%	95%	100%	100%
2	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase target kinerja RKPDs yang tercapai	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tabel tersebut di atas maka selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Donri-Donri sebagai berikut :

- ✓ Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Total permohonan ijin yang masuk}} \times 100\%$$

- ✓ Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$$

- ✓ Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kinerja yang tercapai}}{\text{Total kineja pada RKPDes}} \times 100\%$$

- ✓ Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prsarana}} \times 100\%$$



BAB VII

PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016-2021 merupakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi seluruh aparat di lingkungan Kecamatan Donri-Donri dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021.

Renstra merupakan instrumen pengarah dan pengendali pembangunan sekaligus alat kontrol bagi stakeholder dan masyarakat Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Donri-Donri Soppeng untuk Tahun 2016-2021 yang siap diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk menopang Visi dan Misi Kabupaten Soppeng.

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Donri-Donri Tahun 2016 - 2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Donri-Donri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Tajuncu, 3 Januari 2017

Camat Donri-Donri,



Drs. H. FATEKHUDDIN, M. Si
Nip. 19650519 199401 1 001